



Article Informations
Corresponding Email:
dianrachmah0327@gmail.com

Received: 28/05/2026; Accepted:
05/06/2026; Published: 30/06/2026

IMPLEMENTASI DIPLOMASI MULTI-TRACK PEMERINTAH INDONESIA ATAS EKSPLOITASI KERJA MAGANG TERHADAP MAHASISWA DALAM PROGRAM *FERIENJOB* DI JERMAN TAHUN 2023-2024

Dian Rachmah Zubaedah

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini berjudul “*Implementasi Diplomasi Multi-Track Pemerintah Indonesia atas Eksploitasi Kerja terhadap Mahasiswa dalam Program Ferienjob di Jerman Tahun 2023–2024*”. Pada permasalahan ini berawal dari adanya perekrutan untuk mahasiswa Indonesia melalui adanya program Ferienjob yang telah disosialisasikan sebagai bagian dari program magang akademik dari Kemendikbud Ristek, Tetapi dalam pelaksanaannya berubah menjadi suatu bentuk eksploitasi tenaga kerja dengan adanya indikasi eksploitasi pekerja. Pada penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis bagaimana diplomasi multi-track dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Metode penelitian yang akan digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, laporan investigative, dan dokumen resmi dari Kementerian Luar Negeri. Analisis data akan dilakukan dengan model reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil pada penelitian ini akan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (*track one*) berperan aktif dalam melakukan advokasi, koordinasi dengan otoritas Jerman, dan juga proses pemulangan para mahasiswa yang telah menjadi korban. Selain itu, pada jalur diplomasi lain seperti adanya peran dari perguruan tinggi, media massa (*track two dan track five*), dan juga adanya keterlibatan dari masyarakat sipil (*track eight*) yang telah turut memberikan dukungan guna perlindungan bagi mahasiswa serta mendorong akuntabilitas bagi pihak yang terkait.

Kata Kunci: Diplomasi Multi-Track, Eksploitasi Mahasiswa, Ferienjob, Jerman.

Abstract

This research is entitled “The Implementation of Indonesia’s Multi-Track Diplomacy on the Exploitation of Internships for Students in the Ferienjob Program in Germany, 2023–2024.” The issue arises from the recruitment of Indonesian students through the Ferienjob program, which was initially socialized as part of the academic internship program under the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. However, in its implementation, it shifted into a form of labor exploitation, with clear indications of worker abuse.

The aim of this research is to analyze how multi-track diplomacy has been carried out by the Indonesian government. The research method employed is descriptive qualitative, with data collected through literature review, investigative reports, and official documents from the Ministry of Foreign Affairs. Data analysis will be conducted using the model of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings of this research are expected to show that the Indonesian government, through the Ministry of Foreign Affairs (track one), has played an active role in advocacy, coordination with German authorities, and the repatriation process of victimized students. In addition, other diplomatic tracks, such as the involvement of universities and the mass media (track two and track five), as well as civil society (track eight), have contributed significantly in providing protection for students and in pushing for accountability of the related parties.

Keywords: Multi-Track Diplomacy, Student Exploitation, Ferienjob, Germany.

1. PENDAHULUAN

Jerman telah menjadi mitra yang strategis bagi Indonesia pada kawasan Eropa, terlebih pada pengembangan sumber daya manusia maupun pendidikan. Pada hubungan ini mencakup dalam berbagai program seperti beasiswa, magang, pelatihan kerja serta pertukaran pelajar yang melibatkan mahasiswa Indonesia di berbagai institusi Jerman. Dengan adanya kemajuan di era sekarang sangat membuka peluang yang baru bagi seseorang yang ingin mengembangkan pengalaman dan keterampilan di tingkat internasional bagi mahasiswa. Di tengah adanya kemajuan yang sangat pesat ini, dunia seolah tanpa batas memberikan suatu ruang yang sangat terbuka untuk siapa pun. Dan dapat membentuk cara pandang yang baru bagi individu untuk dapat mengejar dan memaknai suatu kesuksesan akademik maupun professional. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi di era ini cenderung memiliki ambisi yang sangat tinggi untuk mencari peluang pengembangan diri melalui program kegiatan mahasiswa seperti mengikuti kepanitiaan kampus, pertukaran pelajar, relawan, sampai pada kegiatan sebagai partisipasi dalam kegiatan program kerja luar negeri maupun dalam negeri

dengan mencari informasi dari sosialisasi kampus, media sosial dan aplikasi pencari pekerjaan.

Dalam kegiatan program mahasiswa ini menjadi salah satu kegiatan yang sangat banyak diminati oleh mahasiswa salah satunya yaitu program magang ataupun kerja paruh waktu. Dalam kegiatan ini mahasiswa menganggap akan menjadi suatu bantu loncatan yang strategis untuk mengasah suatu keterampilan maupun dapat memperoleh pengalaman kerja yang berpengalaman dan berharga. Namun, pada program yang tersedia memang tidak semua akan berjalan dengan baik dalam melakukan pelaksanaannya, risiko buruk bisa saja terjadi mengenai perusahaan yang memang bertujuan untuk mencari pekerja magang bagi mahasiswa guna memanfaatkan mahasiswa tersebut sebagai pekerja dengan memberikan gaji yang minim tetapi akan diberikan beban pekerjaan yang maximal.

Kejadian yang pernah terjadi pada akhir tahun 2023, di mana adanya penawaran suatu program magang bertaraf internasional yang disosialisasikan oleh salah satu pihak dengan memberikan sosialisasi program magang untuk menimba pengalaman secara profesional bagi mahasiswa yang mengikuti program tersebut¹. Dalam kejadian ini telah mengakibatkan adanya banyak laporan dari mahasiswa yang menjadi korban eksploitasi pekerja yang telah dilaksanakan di Jerman. Pada awalnya program ini menjanjikan berupa suatu pengalaman profesional dan pengembangan pengalaman diri. Ketika sosialisasi, mereka dijanjikan suatu pekerjaan yang legal yang sesuai dengan latar belakang jurusan dan dengan gaji yang cukup tinggi maupun konversi SKS².

Pada kasus ini menyoroti adanya kelemahan perlindungan terhadap mahasiswa Indonesia yang sedang berada di luar negeri, terutama dalam kasus eksploitasi pekerja dalam konteks magang yang telah melibatkan mahasiswa. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah mengklasifikasikan kasus yang melibatkan 1.047 mahasiswa dari 33

¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "*Keterangan Pers Nomor: 15/HM.00/III/2024 Terkait Komnas HAM Desak Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Perusahaan Dan Seluruh Pihak Terkait Pelaku TPPO 1.047 Mahasiswa Ke Jerman,*" (Komnasham 2024)

² Ibid.

universitas di Indonesia, yang mengikuti program magang atau *Ferienjob* ke Jerman, sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)³. Pada kasus ini, Kemendikbud Ristek juga melakukan pengawasan terhadap program-program pertukaran maupun program magang yang melibatkan mahasiswa Indonesia di luar negeri. Sayangnya, pada kasus eksploitasi pekerja terhadap mahasiswa ini yang ternyata diberikan pekerjaan berupa *Ferienjob* yaitu suatu program pekerjaan paruh waktu yang dilakukan oleh mahasiswa Jerman selama liburan semester dan pada program *Ferienjob* ini bukanlah program magang bagi mahasiswa. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan pada adanya legalitas dan integritas program terlihat lemah sehingga membuat mahasiswa dapat dengan mudah mengalami jebakan dalam sistem kerja yang ternyata eksploitatif. Peran KBRI Berlin dalam kasus ini sebagai perwakilan resmi pemerintah Indonesia di Jerman sangat berperan dalam melakukan penanganan pada kasus ini.

KBRI Berlin memiliki peran untuk melindungi warga negara Indonesia di wilayah akreditasinya seperti memberikan bantuan hukum, logistik, dan advokasi terhadap mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan. Namun, pada kesaksian korban eksploitasi pekerja yang melaporkan kejadian ini ke KBRI, mengungkapkan bahwa KBRI dinilai lamban untuk menanggapi suatu keluhan para mahasiswa yang telah melaporkan kejadian ini sejak awal keterlibatan mereka dalam program magang ini. Dalam penyaluran program ini disalurkan oleh PT Cvgen dan PT Sinar Harapan Bangsa (SHB). Para pelaku melakukan sosialisasi di 33 Universitas dengan melakukan memberikan janji-janji manis seperti menyebutkan bahwa pada program ini dapat memberikan berupa konversi nilai dengan 20 SKS perkuliahan, sehingga mahasiswa akan mendapatkan keuntungan akademis yang signifikan. Mereka juga mengklaim bahwa program ini telah terdaftar secara resmi oleh Kemendikbud Ristek, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa program ini memang legal dan aman untuk diikuti sertakan oleh mahasiswa di kampus yang telah bekerjasama dengan PT Cvgen dan PT SHB (Sinar

³ Stefani Wijaya, *Bareskrim Ungkap Alasan Tetapkan Program Ferienjob Jadi Kasus TPPO*. (Jakarta : Berita Satu, 2024)

Harapan Bangsa). Kedua PT ini merupakan perusahaan penyaluran yang beroperasi di Jerman yang mengelola ribuan pelanggan dari Indonesia, PT ini dikelola oleh warga negara Indonesia yang memberikan dukungan serta menyalurkan berbagai aspek pekerjaan kepada masyarakat Indonesia di Jerman⁴. Hal ini menjadi perhatian yang sangat besar bagi kemendikbudristek yang bagaimana kejadian seperti ini bisa terjadi bahkan sampai ke tahap telah dilaksanakan program tersebut.

Metode penelitian yang akan digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, laporan investigative, dan dokumen resmi dari Kementerian Luar Negeri. Analisis data akan dilakukan dengan model reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil pada penelitian ini akan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (*track one*) berperan aktif dalam melakukan advokasi, koordinasi dengan otoritas Jerman, dan juga proses pemulangan para mahasiswa yang telah menjadi korban. Selain itu, pada jalur diplomasi lain seperti adanya peran dari perguruan tinggi, media massa (*track two dan track five*), dan juga adanya keterlibatan dari masyarakat sipil (*track eight*) yang telah turut memberikan dukungan guna perlindungan bagi mahasiswa serta mendorong akuntabilitas bagi pihak yang terkait.

2. PEMBAHASAN

Faktor terjadinya adanya dugaan eksploitasi terhadap para pekerja magang asal Indonesia dalam program magang ke Jerman ini dapat dianalisis melalui dari berbagai sisi yang saling berkaitan. Berikut beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi menurut analisa penulis.

Minimnya Transparansi dan Kontrak Kerja

Kejadian ini berawal dari adanya ketidakjelasan informasi dari awal adanya proses sosialisasi yang dilakukan oleh agen perekrutan

⁴ Amsulistiani Ensich, "PT. CVGEN SMART CONSULTANT: Mitra Terpercaya Saya Sebagai Virtual Assistant Indonesia – Jerman," *EIN Presswire*, 1 Sept. 2024.

magang yaitu PT CVGEN dan PT SHB yang merupakan perusahaan penyaluran yang beroperasi di Jerman yang mengelola ribuan pelanggan dari Indonesia, PT ini dikelola oleh warga negara Indonesia yang memberikan dukungan serta menyalurkan berbagai aspek pekerjaan kepada masyarakat Indonesia di Jerman⁵.

Pada kondisi ini membuat para peserta magang berada pada posisi dibawah tekanan, di mana ketika mereka telah tiba di Jerman harus menandatangani suatu dokumen yang mengikat secara hukum namun mereka tidak memahami arti didalamnya. Situasi ini semakin buruk oleh adanya fakta bahwa pihak kampus serta agen penyalur di Indonesia tidak menyediakan suatu pendampingan hukum serta penerjemah yang resmi. Dalam praktik hubungan kerja internasional, kejadian tidak transparan kontrak seperti ini sangat membuka celah bagi adanya perubahan sepihak penempatan kerja yang dari awal sudah berbeda karena pekerja magang tidak memiliki dokumen tertulis yang dapat mereka pahami guna dijadikan sebuah acuan.⁶

Sistem Penyaluran Perekrutan Pekerja

Proses pelaksanaan penyaluran pekerja magang ini melibatkan beberapa pihak yang cukup panjang. Perekrutan melalui sosialisasi dari perusahaan agen PT CVGEN dan PT SHB yang merupakan perusahaan penyaluran yang beroperasi di Jerman yang mengelola ribuan pelanggan dari Indonesia, PT ini dikelola oleh warga negara Indonesia yang memberikan dukungan serta menyalurkan berbagai aspek pekerjaan kepada masyarakat Indonesia di Jerman⁷. Yang dilakukan di tempat kampus secara terbuka dengan adanya kerjasama

⁵ Amsulistiani Ensich, *PT. CVGEN SMART CONSULTANT: Mitra Terpercaya Saya Sebagai Virtual Assistant Indonesia – Jerman* (*EIN Presswire*, 1 Sept 2024)

⁶ DW Indonesia, “Mahasiswa korban penipuan magang ferienjob di Jerman.” *YouTube.*, 28 Maret 2024, <https://youtu.be/d4TAZIggby>

⁷ Amsulistiani Ensich, “*PT. CVGEN SMART CONSULTANT: Mitra Terpercaya Saya Sebagai Virtual Assistant Indonesia – Jerman,*” (*EIN Presswire*, 1 Sept. 2024)

dengan pihak-pihak kampus. Agen ini melakukan proses perekrutan dan sosialisasi kepada mahasiswa dan menawarkan beberapa keuntungan dalam program magang dengan berstandar internasional. Dalam pelaksanaannya banyak mahasiswa yang tertarik dengan program ini, dan menurut bareskrim polri total mahasiswa yang ikut dalam program magang ini sebanyak kurang lebih 1000 mahasiswa dari berbagai universitas.

Setelah peserta magang mendaftar, peserta diarahkan untuk melakukan pemberangkatan ke Jerman pada awal bulan oktober 2025⁸. Pada pernyataan diatas dijelaskan bahwa peserta mulai merasakan adanya sebuah kejanggalan yang dirasakan ketika tiba di Jerman. Berdasarkan dari keterangan pada referensi tanya jawab tersebut, pihak agen dari Indonesia yaitu PT SHB sebelumnya telah memberikan janji kepada para peserta magang yang ketika setibanya di Jerman akan diberikan berupa akomodasi. Namun pada kenyataannya setiba di Bandara *Dusseldorf*, peserta terlantar tanpa adanya kepastian arah maupun tujuan. Pada saat yang sama juga para peserta secara tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa ia telah dikeluarkan dari sebuah grup *whatsapp* tempat dimana dia akan bekerja. Dalam kondisi ini, para peserta mengalami kebingungan dan tidak memiliki kontak yang dapat dihubungi. Akhirnya mereka harus menunggu selama satu hari di bandara sebelum akhirnya mereka mendapat informasi bahwa diterima pekerjaan di perusahaan pengiriman DHL dari agen penyaluran di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa para peserta telah dialihkan dari tanggung jawab PT SHB di Indonesia kepada agen yang ada di Jerman, sehingga secara status hukum mereka telah bekerja di bawah kontrak dengan pihak ketiga, tidak secara langsung dengan perusahaan tempat mereka bekerja.

Dengan hal ini, posisi peserta secara resmi yaitu sebagai pekerja *outsourcing* lintas negara. Yang dimana pada seluruh urusan

⁸ Ibid.

administrasi, penempatan, serta permasalahan kerja telah berada di bawah kendali agen di Jerman, sementara dari pihak agen yang di Indonesia tidak lagi memberikan komunikasi serta pertanggung jawaban.⁹

Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan Informasi Awal

Pada program ini awalnya disosialisasikan sebagai magang non-skill atau sebuah pekerjaan yang ringan yang dapat dilakukan oleh siapapun, dengan mendapatkan penempatan di pabrik industri. Akan tetapi pada kenyataannya ketika para peserta datang ke Jerman, mereka ditempatkan di perusahaan logistik DHL serta di perusahaan logistik lain, yang pada pekerjaan ini sangat memerlukan fisik yang ekstra serta melibatkan pekerjaan yang berat seperti mengangkat paket hingga 30kg, memindahkan barang dari tangga satu ke tangga lain serta bekerja dengan tekanan target yang cukup berat.¹⁰ Pada pergantian dari pekerjaan yang dijanjikan ke dalam pekerjaan yang berat tanpa adanya persetujuan yang tertulis ini menunjukkan adanya kondisi di mana pada satu pihak dalam kontrak memberikan atau membuat pernyataan yang palsu mengenai fakta kepada pihak mahasiswa yang bergantung pada agen tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No 21 tahun 2007 mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, penggunaan jebakan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat guna memperoleh persetujuan dari individu yang memiliki kendali atas

⁹ MetroTV, “Mahasiswa Tertipu! Korban Magang Bodong di Jerman.” YouTube, diunggah oleh MetroTV, 27 Maret 2024, <https://youtu.be/9GTsxhwh2Hg>

¹⁰ MetroTV, “Mahasiswa Tertipu! Korban Magang Bodong di Jerman.” YouTube, diunggah oleh MetroTV, 27 Maret 2024, <https://youtu.be/9GTsxhwh2Hg>

orang lain, baik di dalam negeri maupun antar negara, dengan tujuan eksploitasi atau menyebabkan eksploitasi¹¹.

Implementasi Track One Diplomacy: Diplomasi Pemerintah

Tanggapan awal pemerintah mengenai kasus ini yaitu dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai instansi terkait. Tim ini bisa melibatkan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tim khusus ini bertugas untuk menangani dan mengawasi setiap kasus TPPO yang menyamar sebagai program magang, memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindaklanjuti dengan serius.¹² Ditemukan juga adanya permasalahan mengenai adanya ketidaksesuaian informasi serta ekspektasi antara mahasiswa dengan agen penyelenggara program. Beberapa mahasiswa mengajukan berupa pengajuan Karena merasa tertipu serta merasa disalahpahami sejak adanya proses sosialisasi di Indonesia. Dalam informasi yang telah diberikan, pada program magang ini disosialisasikan sebagai bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta disebutkan benefit berupa adanya konversi nilai mata kuliah tertentu¹³.

Implementasi Track Two: Diplomasi Non-Pemerintah

Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada bidang Hak Asasi Manusia memiliki peran yang sangat penting. Khususnya pada perguruan tinggi yang memiliki peran sebagai mengkritisi kebijakan sekaligus penyedia analisis akademik yang secara objektif mengenai adanya tata kelola program pendidikan

¹¹ Astuti Nur Fadillah, Muammar, and Sartik la Antio, "Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia," *Sanisa : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, Vol. 2 (2022): 81–91.

¹² Redaksi Daerah, "Langkah Pemerintah Hadapi Skandal Magang TPPO Jerman" *Potret Manado*, 3 April 2024.

¹³ MetroTV. "HOTROOM - Perdagangan Mahasiswa Berkedok Magang di Jerman?" YouTube by MetroTV, 17 April 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=u92kcMQU-nk>

dan ketenagakerjaan secara lintas negara. Hal ini dapat di analisa bahwa para pihak kampus pada dasarnya hanya menjalankan program dalam rangka berupaya membuka peluang bagi para mahasiswa untuk tidak hanya mengembangkan kapasitas akademik di dalam negeri saja, tetapi juga dapat memperoleh berupa pengalaman secara internasional yang dianggap sangat penting dalam meningkatkan adanya daya saing secara global.¹⁴

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengambil peran yang strategis dalam melakukan perlindungan bagi para korban melalui fasilitas restitusi, yang mencakup pada bantuan pengembalian kerugian bagi korban, termasuk pada hutang yang di timbul guna tiket pesawat, cek keSehatan, dan biaya visa. Perlindungan ini bersifat sukarela, sehingga para korban harus secara aktif mengajukan permohonan. Dengan demikian, pada permasalahan ini menegaskan bahwa adanya perlindungan dari lembaga negara seperti LPSK¹⁵. LPSK juga memberikan pernyataan bahwa perlu adanya pemerintah melakukan sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO secara terpadu pada setiap level pemerintahan, yaitu di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota¹⁶.

Implementasi Track Five: Diplomasi Media

Media massa memiliki suatu peran yang penting dalam advokasi publik dengan memberikan beberapa fungsi utama. Media berfungsi sebagai sarana informasi yang dapat menyebarkan fakta-fakta mengenai kasus ini terhadap masyarakat luas, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pada liputan media ini membantu adanya

¹⁴ MetroTV. "*HOTROOM - Perdagangan Mahasiswa Berkedok Magang di Jerman?*" YouTube by MetroTV, 17 April 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=u92kcMQu-nk>

¹⁵ Ananda Nararya. "LPSK Terima Permohonan TPPO 1.297, Diperlukan Penguatan dan ..." *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)* 31 Juli 2024.

¹⁶ Ibid.

kesadaran public terhadap adanya resiko program magang internasional yang tidak resmi, dan juga menyoroti adanya praktik-praktik penyaluran tenaga kerja maupun magang yang telah menyalahi prosedur dan merugikan para mahasiswa.

Media sangat berperan sebagai alat tekanan sosial mengenai pihak-pihak yang terkait, termasuk pada institusi pendidikan, pemerintah, maupun para agen penyalur. Dengan adanya pemberitaan yang secara luas serta akurat, media mendorong para pihak berwenang guna segera dapat mengambil langkah secara hukum serta regulasi, seperti yang telah terlihat pada Polri yang telah mengungkapkan kasus ini setelah adanya liputan serta laporan media yang telah memicu adanya perhatian publik.

Melalui adanya referensi pembicaraan dengan para korban yang terdampak, pemberitaan di media memberikan ruang bagi suara para korban untuk dapat didengar, sehingga pada kasus ini tidak hanya menjadi suatu data statistic, tetapi menjadi cerita yang nyata mempengaruhi opini publik. Bagian ini juga yang dapat mendorong lembaga terkait, seperti KBRI, perguruan tinggi, dan juga organisasi mahasiswa seperti PPI Dunia, untuk lebih menanggapi terhadap adanya keluhan dari mahasiswa yang telah menjadi korban eksploitasi.

Implementasi Track Eight: Diplomasi Pendidikan dan Riset

Beberapa universitas di Indonesia, termasuk Universitas Jambi berperan dalam memberikan sosialisasi program magang berstandar internasional terhadap mahasiswa. Dalam melakukan sosialisasinya, program ini seringkali direpresentasikan sebagai bagian dari program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Institusi pendidikan memiliki suatu tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi mahasiswa dalam pelaksanaan program di luar negeri. Berdasarkan pada laporan referensi analasi ini, dapat dianalisa bahwa tanggapan kampus terhadap masalah yang telah dialami mahasiswa akibat program magang internasional belum sepenuhnya memadai. Tanggapan dari kampus dianggap belum memadai karena mahasiswa merasa tidak cukup untuk diberikan ruang untuk adanya kejelasan

pengalaman mereka yang secara menyeluruh. Pada hal ini menandakan adanya kesenjangan bagi peran fasilitator awal serta fungsi pengawasan atau penyelesaian masalah¹⁷.

Mahasiswa mengharapkan adanya peluang untuk dapat menceritakan kronologi pengalaman mereka dengan secara rinci, termasuk pada kendala serta eksploitasi yang telah mereka lalui, bahkan ketika mahasiswa ingin mencoba untuk menjelaskan seluruh permasalahan, pihak kampus memotong pembicaraan. Pada hal ini menjelaskan adanya kurangnya itikad untuk menyelidiki atau melakukan evaluasi program.

Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (PPI) memiliki peran dalam kasus eksploitasi mahasiswa Indonesia di Jerman. Sebagai organisasi mahasiswa Indonesia di luar negeri yang memiliki jejaring yang luas serta bersifat independen, memainkan peran yang penting dalam mengadvokasi adanya isu eksploitasi mahasiswa Indonesia di Jerman¹⁸. PPI Dunia turut menjadi penghubung untuk menyampaikan suara mahasiswa kepada ruang publik. Dengan melalui media sosial, siaran pers, serta forum diskusi, PPI Dunia mengangkat isu dari dugaan eksploitasi yang telah dialami para mahasiswa sehingga pada kasus ini tidak hanya berhenti pada lingkup individu, tetapi juga mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, pemerintah, serta media nasional. PPI Dunia berperan juga sebagai penghubung informal bagi mahasiswa serta pemerintah.

Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Diplomasi Multi-track

Implementasi diplomasi multi-track dalam konteks perlindungan mahasiswa Indonesia korban eksploitasi ini menghadapi berbagai hambatan serta tantangan yang kompleks, baik yang bersifat

¹⁷ MetroTV. "Mahasiswa Tertipu! Korban Magang Bodong di Jerman." Youtube, uploaded by MetroTV, 12 Apr. 2024, www.youtube.com/watch?v=9GTsxhwh2Hg

¹⁸ BAGUS AHMAD RIZALDI. *PPI DUNIA APRESIASI POLRI UNGKAP KASUS MAGANG PALSU KE JERMAN*. ANTARA NEWS, 27 MARET 2024.

struktural serta operasional. Diplomasi multi-track sendiri merupakan suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh Louise Diamond dan John McDonald yang menekankan perlunya pendekatan diplomasi yang melibatkan berbagai aktor di luar jalur diplomasi resmi pemerintah. Diamond membagi diplomasi ini ke dalam beberapa “track” atau jalur yang saling melengkapi¹⁹. Pada penelitian ini melibatkan dari berbagai jalur diplomasi, mulai dari *track one* (pemerintah ke pemerintah), *track two* (organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi), hingga *track five* dan *track eight* yang meliputi individu, organisasi profesional, serta media sebagai saluran advokasi publik.²⁰

Hambatan ini muncul ketika adanya koordinasi antar lintas track. Contohnya, pemerintah melalui KBRI Berlin menerima adanya pengaduan dari mahasiswa Indonesia yang telah menjadi korban eksploitasi kerja di Jerman, tetapi informasi yang diterima sangat terbatas serta tanggapan yang tidak selalu cepat, sehingga para mahasiswa ini tetap mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak mereka pada melakukan magang, hambatan ini menunjukkan adanya kesenjangan bagi jalur diplomasi yang resmi serta praktik di lapangan, yang mana para agen penyalur di Jerman seperti Brisk United GmbH dan Runtime menjadi titik tumpu pada operasional yang tidak sepenuhnya telah berada di bawah pengawasan pemerintah Indonesia.

Tantangan lain muncul dengan kaitannya peran institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat, yang seharusnya menjadi peran pengawas serta pendampingan bagi mahasiswa. Yang dalam beberapa kasus, kampus memberikan ruang evaluasi yang terbatas, sedangkan pada LSM seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memberikan perlindungan terhadap korban.

Pada hambatan lain juga muncul dari adanya perbedaan budaya serta komunikasi, yang dimana perbedaan bahasa serta sistem kerja yang ada di Jerman ini menjadi faktor tambahan yang mempersulit ara

¹⁹ Louise Diamond and John W. McDonald, *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace* (West Hartford, CT: Kumarian Press, 1996), 25–30.

²⁰Ibid, hlm. 9–10.

mahasiswa untuk mengadakan kondisi mereka secara efektif. Strategi diplomasi multitrack yang ideal ini seharusnya dapat mengatasi adanya hambatan ini melalui adanya integritas melalui jalur komunikasi yang lebih sistematis, edukasi pra-keberangkatan, serta adanya pemantauan yang berkelanjutan di lapangan.

Secara keseluruhan, pada implementasi diplomasi multi-track ini dapat menunjukkan bahwa walaupun ada upaya perlindungan melalui berbagai jalur diplomasi, hambatan seperti struktural, koordinasi antar lembaga, perbedaan regulasi, serta keterbatasan mengenai pemahaman mahasiswa ini menjadi sebuah tantangan utama yang harus dapat diantisipasi agar pada perlindungan ini para mahasiswa dan institusi pendidikan lebih efektif dan pada risiko eksploitasi dapat diminimalkan.

Analisis Kesesuaian Strategi Diplomasi dengan Nilai Liberalisme

Nilai-nilai liberalisme dalam hubungan internasional ini menekankan kepada adanya perlindungan hak bagi individu, kerja sama antar negara, peran institusi internasional, serta pentingnya aktor non-negara.²¹ Apabila dihubungkan pada strategi diplomasi Indonesia dalam menangani kasus eksploitasi mahasiswa Indonesia di Jerman, terlihat adanya kesesuaian yang mencerminkan adanya prinsip liberalisme.

Pada sisi perlindungan hak individu, langkah dari Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin dalam menerima adanya pengaduan mahasiswa yang menjadi korban eksploitasi dan memberikan penyaluran kepada para pihak kepolisian Jerman dan juga aparat hukum di Indonesia menunjukkan bahwa dalam diplomasi Indonesia tidak hanya berorientasi pada adanya kepentingan negara, melainkan juga dapat ditempatkan pada keselamatan serta hak-hak warga negara sebagai prioritas utama. Hal ini juga selaras dengan bagaimana pemikiran liberal bahwa aktor utama yang harus dilindungi dalam politik internasional bukan hanya

²¹ Alice Agatha Delfreeta Aritonang. *HUBUNGAN INTERNASIONAL & DIPLOMASI*, (ResearchGate, 2024)

negara, melainkan juga individu²². Strategi diplomasi dengan liberalism juga terlihat pada peran aktor non-negara seperti Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia), media massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Advokasi yang telah dilakukan oleh PPI Dunia dan pemberitaan media nasional serta internasional ini menjadi faktor yang penting dalam menekankan pemerintah guna dapat mengambil langkah diplomasi yang tegas. Pada keterlibatan aktor non-negara ini memperlihatkan bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya terbatas pada adanya hubungan antarnegara, tetapi juga dapat terbuka mengenai adanya kontribusi masyarakat sipil yang sebagaimana ditegaskan dalam teori liberalisme menurut Burchill and Scott²³.

Secara umum dalam strategi diplomasi Indonesia pada kasus ini dapat dianalisa secara keseluruhan bahwa konsisten dengan nilai-nilai liberalism karena menempatkan adanya perlindungan secara individu sebagai prioritas, mengedepankan adanya kerja sama internasional, serta mengakui adanya peran dari para aktor non-negara dalam melakukan perlindungan bagi mahasiswa yang menjadi korban eksploitasi kerja.

3. KESIMPULAN

Pada kasus ini mencerminkan adanya kelemahan mekanisme terhadap perlindungan WNI khususnya pada mahasiswa yang berada di luar negeri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI Berlin, Polri, PPI hingga LPSK telah melakukan upaya dengan memberikan perlindungan serta penanganan, walaupun pada tanggapan awal dinilai kurang cepat serta koordinasi antarlembaga yang belum sepenuhnya maksimal. Pada kondisi ini menunjukkan

²² Robert Jackson and Georg Sørensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. 5th ed., Oxford University Press, 2013.

²³ Burchill, Scott. "Liberalism." *Theories of International Relations*, 5th ed., Palgrave Macmillan, (2013) 57–85.

perlu adanya strategi diplomasi yang akan lebih adaptif serta melibatkan berbagai aktor dalam satu kesatuan untuk upaya melakukan perlindungan. Berdasarkan analisis penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa adanya langkah strategis bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dan memperketat verifikasi program magang internasional yang ditawarkan dari pihak swasta maupun universitas.

Pada institusi pendidikan diharapkan akan lebih berhati-hati dalam melakukan kerja sama internasional dengan melakukan pengecekan dan pengarahan yang ketat. PPI Dunia dan LSM juga perlu memperkuat adanya peran advokasi serta melakukan pendampingan bagi mahasiswa agar menjadi mitra yang strategis bagi pemerintah. Media juga perlu adanya menjaga pemberitaan yang kritis serta berimbang guna mendorong adanya transparansi. Dan juga, kerja sama Indonesia dan Jerman yang perlu difokuskan pada adanya perumusan regulasi bilateral yang jelas mengenai program magang, penempatan tenaga kerja mahasiswa, dan juga melakukan perlindungan hukum agar kejadian serupa tidak terjadi di masa depan. Dengan demikian, dapat ditegaskan pada permasalahan ini perlu adanya strategi diplomasi multi-track yang inklusif serta berbasis pada kolaborasi antar lintas aktor yang merupakan menjadi langkah yang penting untuk memperkuat adanya perlindungan sekaligus dapat menjaga kepentingan nasional dalam dinamika global yang semakin kompleks.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *“Keterangan Pers Nomor: 15/HM.00/III/2024 Terkait Komnas HAM Desak Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Perusahaan Dan Seluruh Pihak Terkait Pelaku TPPO 1.047 Mahasiswa Ke Jerman,”* (Komnasham 2024)

Stefani Wijaya, *Bareskrim Ungkap Alasan Tetapkan Program Ferienjob Jadi*

Kasus TPPO. (Jakarta : Berita Satu, 2024)

Amsulistiani Ensich, "PT. CVGEN SMART CONSULTANT: Mitra Terpercaya Saya Sebagai Virtual Assistant Indonesia – Jerman," *EIN Presswire*, 1 Sept. 2024.

Amsulistiani Ensich, *PT. CVGEN SMART CONSULTANT: Mitra Terpercaya Saya Sebagai Virtual Assistant Indonesia – Jerman* (*EIN Presswire*, 1 Sept 2024)

DW Indonesia, "Mahasiswa korban penipuan magang ferienjob di Jerman." *YouTube.*, 28 Maret 2024, <https://youtu.be/d4TAZlqgby>

Amsulistiani Ensich, "PT. CVGEN SMART CONSULTANT: Mitra Terpercaya Saya Sebagai Virtual Assistant Indonesia – Jerman," (*EIN Presswire*, 1 Sept. 2024

MetroTV, "Mahasiswa Tertipu! Korban Magang Bodong di Jerman." *YouTube*, diunggah oleh MetroTV, 27 Maret 2024, <https://youtu.be/9GTsxhwh2Hg>

MetroTV, "Mahasiswa Tertipu! Korban Magang Bodong di Jerman." *YouTube*, diunggah oleh MetroTV, 27 Maret 2024, <https://youtu.be/9GTsxhwh2Hg>

Astuti Nur Fadillah, Muammar, and Sartik la Antio, "Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia," *Sanisa : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, Vol. 2 (2022): 81–91.

Redaksi Daerah, "Langkah Pemerintah Hadapi Skandal Magang TPPO Jerman" *Potret Manado*, 3 April 2024.

MetroTV. "HOTROOM - Perdagangan Mahasiswa Berkedok Magang di Jerman?" *YouTube* by MetroTV, 17 April 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=u92kcMQu-nk>

MetroTV. "HOTROOM - Perdagangan Mahasiswa Berkedok Magang di Jerman?" *YouTube* by MetroTV, 17 April 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=u92kcMQu-nk>

Ananda Nararya. "LPSK Terima Permohonan TPPO 1.297, Diperlukan Penguatan dan ..." *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)* 31 Juli 2024.

MetroTV. "Mahasiswa Tertipu! Korban Magang Bodong di Jerman." Youtube, uploaded by MetroTV, 12 Apr. 2024, www.youtube.com/watch?v=9GTsxhwh2Hg

BAGUS AHMAD RIZALDI. *PPI DUNIA APRESIASI POLRI UNGKAP KASUS MAGANG PALSU KE JERMAN*. ANTARA NEWS, 27 MARET 2024.

Louise Diamond and John W. McDonald, *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace* (West Hartford, CT: Kumarian Press, 1996), 25–30.

Alice Agatha Delfreeta Aritonang. *HUBUNGAN INTERNASIONAL & DIPLOMASI*, (ResearchGate, 2024)

Robert Jackson and Georg Sørensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. 5th ed., Oxford University Press, 2013.

Burchill, Scott. "*Liberalism*." *Theories of International Relations*, 5th ed., Palgrave Macmillan, (2013) 57–85.